

STUDI KEAMANAN INTERNATIONAL PASCA PERANG DINGIN

Umar Suryadi Bakry
Dosen FISIP-HI Universitas Jayabaya
E-mail: u_bakry@yahoo.com.sg

ABSTRACT

This paper is intended to explain the conceptual developments in International Security Studies after the end of the Cold War. Since the end of the Cold War, there has been something of a paradigm shift in both International Relations and International Security Studies. First, there was a 'widening' or 'broadening' of the subject area of International Security Studies. International Security Studies is no longer focused on issues of conflict, nuclear weapons, and military strategy of the big powers, but has been widened and broadened on the issues that are marginalized by various high-level diplomacy during the Cold War era, such as environmental degradation, economic security, scarcity of energy and other natural resources, the problem of infectious diseases, and others. Second, there was also a trend towards 'deepening' in International Security Studies. This referred to the shift of emphasis away from the security of the national state towards a greater concern for the security of the individual. This shift in focus has given rise to increasing interest in the topics of 'human security', as well as a recognition that during the application of the concept of 'national security' that glorified many countries did not cover or protect the security of individual.

Keywords: *International Security Studies, International Relations, Cold War, national security, human security.*

ABSTRAK

Tulisan ini dimaksudkan untuk menjelaskan perkembangan konseptual dalam Studi Keamanan Internasional setelah berakhirnya Perang Dingin. Sejak akhir Perang Dingin, ada suatu pergeseran paradigma baik dalam studi Hubungan Internasional maupun Studi Keamanan Internasional. Pertama, ada 'pelebaran' atau 'perluasan' tentang wilayah yang dikaji dari Studi Keamanan Internasional. Studi Keamanan Internasional tidak lagi terfokus pada isu-isu konflik, senjata nuklir, dan strategi militer dari negara-negara besar, tetapi telah melebar dan meluas pada isu-isu yang terpinggirkan oleh berbagai diplomasi tingkat tinggi selama era Perang Dingin, seperti degradasi lingkungan, keamanan ekonomi, kelangkaan energi dan sumber daya alam lainnya, masalah penyakit menular, dan lain-lain. Kedua, juga ada kecenderungan 'pendalaman' dalam Studi Keamanan Internasional. Ini disebut sebagai pergeseran penekanan dari keamanan negara nasional menuju perhatian yang lebih besar terhadap keamanan individu. Pergeseran fokus ini telah menimbulkan meningkatnya minat dalam topik-topik 'keamanan manusia', serta pengakuan bahwa selama penerapan konsep 'keamanan nasional' yang diagung-agungkan banyak negara tidak mencakup atau melindungi keamanan individu.

Kata Kunci: Studi Keamanan Internasional, Hubungan Internasional, Perang Dingin, keamanan nasional, keamanan manusia.

PENDAHULUAN

Studi keamanan dalam konteks global, atau sering disebut dengan studi keamanan internasional (*international security studies*) merupakan bagian (*sub-discipline*) dari studi Hubungan Internasional (HI). Studi keamanan telah berkembang dalam studi HI sebagai pintu masuk untuk memahami kekuatan-kekuatan pendorong (*driving forces*) dalam politik internasional. Semakin meningkatnya konflik dan bencana global membuat studi tentang keamanan semakin penting bagi para pembuat kebijakan dan akademisi, khususnya untuk memahami dan memprediksikan berbagai perilaku dalam politik global.

Peter Hough mendefinisikan HI sebagai studi tentang semua interaksi politik antar aktor-aktor internasional, yang meliputi negara-negara (diwakili oleh pemerintah), organisasi internasional (baik organisasi antar-pemerintah maupun non-pemerintah), dan individu swasta. Pokok bahasan keamanan internasional menaruh perhatiannya pada sebagian dari interaksi politik tersebut, yang secara khusus berkepentingan dengan pengelolaan keamanan para aktor.¹ Sementara itu Albert Carnesale dan Michael Nacht mendefinisikan keamanan (*security*) sebagai faktor yang mempengaruhi langsung pada struktur dari sistem negara-bangsa dan kedaulatan dari anggota-anggotanya, dengan penekanan khusus pada penggunaan ancaman (*the use of threat*) dan pengendalian kekuatan (*control of force*).²

Sebagai sub-disiplin atau sub-bidang (*sub-field*) dari studi HI, pokok bahasan tentang keamanan internasional mengalami perkembangan yang sangat pesat selama era Perang Dingin. Studi-studi yang dilakukan Thomas Schelling, Henry Kissinger, dan kebanyakan sarjana HI beraliran realis hampir semuanya menaruh perhatian pada isu-isu keamanan internasional. Di mata kaum realis, studi tentang keamanan internasional (begitu juga politik internasional) menempati posisi paling vital dalam studi HI. Banyak *textbooks* HI yang ditulis kaum realis isinya didominasi bahasan mengenai keamanan internasional dan politik internasional. Studi keamanan internasional begitu penting bagi studi HI, Sebab itu Alan Collins menyebut studi keamanan internasional terletak di jantungnya studi HI (*the study of international security lies at the heart of International Relations*).³ Tulisan ini dimaksudkan untuk menjelaskan berbagai perkembangan konseptual dalam studi keamanan internasional pasca Perang Dingin berakhir, didahului dengan deskripsi mengenai sejarah pertumbuhan studi keamanan internasional pasca Perang Dunia (khususnya selama era Perang Dingin).

SEJARAH PERTUMBUHAN STUDI KEAMANAN

Studi keamanan internasional merupakan salah satu pokok bahasan yang relatif baru dalam studi HI. Jika studi keamanan didefinisikan sebagai kajian tentang hakikat,

¹ Peter Hough, *Understanding Global Security* (London: Routledge, 2004), hal. 2.

² Albert Carnesale dan Michael Nacht, "Forward", dalam *International Security*, Vol. 1 No. 1 (1976), hal. 2.

³ Alan Collins (ed.), *Contemporary Security Studies* (Oxford: Oxford University Press, 2013), hal. 1

penyebab, efek, dan pencegahan perang maka periode antara Perang Dunia I dan Perang Dunia II (sering disebut sebagai *interwar period*) dapat dikatakan merupakan masa vakum dalam tradisi akademis tentang keamanan. Selama periode itu para sarjana HI meyakini bahwa demokrasi, *international understanding*, arbitrase, penentuan nasib sendiri (*self-determination*), perlucutan senjata, dan keamanan kolektif sebagai instrumen yang paling penting untuk mempromosikan perdamaian dan keamanan internasional.⁴ Sebab itu mereka cenderung menekankan pentingnya hukum internasional dan organisasi internasional daripada kekuatan militer.

Satu-satunya karya akademik yang dapat dikatakan sebagai sebuah studi yang membahas tentang keamanan internasional pada *interwar period* adalah buku *Study of War* dari Quincy Wright yang terbit 1942. Menurut William Fox, buku ini menjadi penting dan sangat terkenal karena kurangnya perhatian pada saat itu terhadap masalah-masalah keamanan nasional dan strategi nasional. Dalam buku itu Wright mengatakan bahwa perang merupakan sebuah masalah yang harus dipecahkan, penyakit yang harus disembuhkan, dan bukan sebuah instrumen kenegaraan yang diperlukan untuk menciptakan keamanan nasional sebagaimana yang diyakini kaum realis. Wright juga menggambarkan perang sebagai sebuah gangguan fungsi (*malfunction*) atau kegagalan dari sistem internasional.

Secara umum, pemikiran-pemikiran yang mengatakan bahwa kekuatan militer sebagai instrumen kenegaraan untuk mempromosikan keamanan nasional cenderung kurang mendapat tempat pada *interwar period*, khususnya sebelum 1940. Namun, semua ini berubah dengan cepat setelah meledaknya Perang Dunia II, dimana masalah keamanan nasional mulai menjadi pusat perhatian utama para penstudi HI saat itu. Para sarjana HI mulai mengakui bahwa kekuatan militer merupakan pertimbangan utama dalam merumuskan kebijakan terkait dengan konflik antar negara kala itu.⁵ Pada 1941, misalnya, kuliah tentang perang dan kebijakan nasional dirancang oleh Grayson Kirk, John Herz, Bernard Brodie, Felix Gilbert, Alfred Vagts, dan lain-lain yang saat itu mengajar di Columbia University. Kuliah serupa juga dikembangkan selama Perang Dunia II di Princeton University, University of North Carolina, Pennsylvania University, dan sebagainya.

David Baldwin mengatakan bahwa periode pasca Perang Dunia II sebagai masa paling kreatif dan menarik dalam keseluruhan sejarah studi keamanan. Seiring dengan bangkitnya realisme dalam studi HI yang dipelopori Hans Morgenthau dan kawan-kawan, studi keamanan internasional mulai berkibar di lingkungan studi HI pada dekade pertama pasca Perang Dunia II. Kuliah tentang politik internasional dan politik luar negeri mulai memasukkan aspek-aspek keamanan. Bahkan di beberapa universitas, studi tentang keamanan dikelola dalam mata kuliah tersendiri di lingkungan studi HI, misalnya di John Hopkins University dan Columbia University. Jurnal ilmiah profesional yang memuat tulisan-tulisan tentang keamanan nasional dan internasional juga mulai terbit pada periode itu, misalnya *International Organization* (1947) dan *World Politics* (1948).⁶ Saat itu studi-studi keamanan internasional lebih terfokus pada

⁴ William T.R. Fox sebagaimana dikutip David A. Baldwin, "Security Studies and the End of the Cold War", dalam *World Politics*, Vol. 48 No. 1 (1995), hal. 117-141.

⁵ William T.R. Fox sebagaimana dikutip David A. Baldwin, *ibid.*

⁶ David A. Baldwin, *ibid.*, hal. 121.

pemahaman mengenai konsep keamanan nasional (*national security*), terkait dengan mulai memanasnya hubungan Timur-Barat.

Selama periode 1945-1955, para sarjana HI banyak yang mengakui pentingnya kekuatan militer sebagai instrumen kenegaraan. Tetapi studi keamanan saat itu belum banyak memberi perhatian pada isu senjata nuklir dan *deterrence* (penangkalan). Tidak ada tema sentral atau pertanyaan penelitian tunggal yang mendominasi studi keamanan saat itu, tetapi ada empat tema lama yang disoroti oleh para penstudi HI. *Pertama*, keamanan tidak dipandang sebagai tujuan utama oleh semua negara di setiap waktu, melainkan sebagai salah satu dari beberapa nilai, serta sebuah kepentingan relatif yang bervariasi dari satu negara dengan negara lain dan dari satu konteks sejarah ke konteks sejarah lainnya. *Kedua*, keamanan nasional dipandang sebagai sebuah tujuan yang harus dikejar, baik melalui teknik-teknik kenegaraan yang bersifat militer maupun non-militer. Ini suatu peringatan terhadap ketergantungan yang berlebihan (*over-reliance*) pada persenjataan secara umum. *Ketiga*, kesadaran mengenai dilemma keamanan (*security dilemma*) sering menyebabkan penekanan pada kehati-hatian sehubungan dengan kebijakan militer. *Keempat*, banyak perhatian dicurahkan pada hubungan antara keamanan nasional dan masalah-masalah domestik, seperti ekonomi, kebebasan sipil, dan proses-proses politik yang demokratis.⁷

Studi keamanan internasional mencapai puncak keemasannya (*its golden age*) pada dekade kedua setelah Perang Dunia II, 1955-1965.⁸ Pada periode ini studi keamanan didominasi oleh masalah senjata nuklir dan isu-isu terkait seperti pengendalian persenjataan (*arms control*) dan pembatasan perang (*limited war*). Pertanyaan sentral yang berkembang saat itu adalah bagaimana bisa sebuah negara menggunakan senjata pemusnah massal (*mass destruction weapons*) sebagai instrumen kebijakan, sedangkan resiko yang dihadapi bersifat timbal balik. Pertanyaan ini mewakili pergeseran fokus dari studi keamanan pada dekade sebelumnya. Para sarjana HI yang memberikan kontribusi terhadap topik-topik baru tentang keamanan tersebut diantaranya Thomas Schelling, Glenn Snyder, William W. Kaufmann, Herman Kahn, Albert Wohlstetter, Henry Kissinger, dan sebagainya. Salah satu teori keamanan yang populer saat itu adalah *deterrence theory* (teori penangkalan).

PENDEKATAN TRADISIONAL TERHADAP KEAMANAN

Studi keamanan internasional tumbuh dari perdebatan mengenai bagaimana negara menghadapi ancaman internal dan eksternal setelah Perang Dunia II. Menurut Barry Buzan dan Lene Hansen, sejak Perang Dunia II telah muncul beberapa teori atau pendekatan yang berusaha membuat penjelasan yang komprehensif mengenai keamanan internasional, diantaranya realisme (dan neorealisme), studi strategis (*strategic studies*), studi keamanan pasca-strukturalis (*poststructuralist security studies*), studi keamanan pasca-kolonial (*postcolonial security studies*), studi perdamaian (*peace research*), studi keamanan feminis (*feminist security studies*), studi keamanan kritis (*critical security studies*), keamanan manusia (*human security*), aliran Kopenhagen, dan

⁷ David A. Baldwin, *ibid.*, hal. 122.

⁸ Colin S. Gray, *Strategic Studies and Foreign Policy: The American Experience* (Kentucky: The University Press of Kentucky, 1982).

konstruktivisme.⁹ Namun, banyak sarjana membagi berbagai teori atau pendekatan tersebut menjadi dua pendekatan besar saja, yaitu pendekatan keamanan tradisional (*traditional security approach*) dan pendekatan keamanan non-tradisional (*non-traditional security approach*).¹⁰

Pendekatan tradisional mengenai keamanan internasional fokus pada aktor negara dan kapabilitas mereka untuk melindungi keamanan nasional (*national security*). Pendekatan ini mewakili pemikiran dari penganut realisme, studi strategis, dan studi perdamaian. Pendekatan keamanan tradisional lebih memberikan perhatian pada isu-isu keamanan konvensional, yang umumnya melibatkan kekerasan (*violence*) dan kerusakan (*destruction*), yang menimbulkan ancaman (*threat*) bagi suatu bangsa. Mereka mendefinisikan keamanan nasional sebagai kemampuan suatu negara untuk menahan agresi dari luar.¹¹ Sebab itu yang dibahas oleh pendekatan tradisional biasanya berkaitan dengan isu-isu militer dan persenjataan, seperti perang antar negara, agresi/intervensi militer, pemberontakan, perang saudara, perlombaan senjata, dan sebagainya. Periode 1930-an hingga 1970-an disebut-sebut sebagai era dominasi pendekatan tradisional dalam studi keamanan internasional ini.

Realisme menggambarkan tatanan dunia (*world order*) sebagai sistem dari aktor-aktor yang bersaing kepentingan di bawah kondisi anarkhi. Pemahaman kaum realis mengenai *world order* ini memiliki pengaruh langsung terhadap definisi keamanan yang mereka rumuskan, yang biasanya selalu dikaitkan dengan anarkhi. Sebelum Perang Dingin berakhir, definisi keamanan dari kaum realis mendominasi studi-studi tentang keamanan. Henry Kissinger, seorang akademisi realis dan mantan menteri luar negeri Amerika Serikat, berpendapat bahwa ‘bagaimana kita secara realistis memandang kepentingan nasional kita, itulah inti dari perhatian kita terhadap keamanan’.¹² Sebab itu kajian keamanan, bagi kaum realis, memusatkan perhatian pada negara sebagai penjamin keamanan (*state as guarantor of security*), sistem negara sebagai determinan perilaku negara, dan keamanan disetarakan dengan kepentingan nasional.

Alan Stolberg mengutip dari Strategi Kebijakan dan Keamanan Nasional AS, mengatakan bahwa ancaman dari anarkhi dalam sistem internasional mempengaruhi strategi keamanan (*security strategy*). Dalam konteks ini, keamanan dipahami sebagai bahasa ketidakamanan (*insecurity*) dan ancaman (*threat*) terhadap negara-bangsa. Sebab itu gagasan tentang sistem negara anarkhis (*anarchic state system*) sebagian besar masih belum tertandingi, bahkan oleh pemikiran liberalis yang menjadi lawan realisme. Kaum realis memang tidak mewajibkan negara-negara melakukan agresi, namun mereka mengasumsikan bahwa ada perasaan ancaman (*sense of threat*) dalam sistem internasional. Menurut Kenneth Waltz, negara-negara akan menggunakan kekerasan

⁹ Barry Buzan dan Lene Hansen, *The Evolution of International Security Studies* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), hal. 35-37.

¹⁰ Lihat Alan Collins (ed.), *op. cit.*, hal. 7.

¹¹ Lihat Giacomo Luciani, “The Economic Content of Security”, dalam *Journal of Public Policy*, Vol. 8 No. 2 (1989), hal. 151-173.

¹² Henry Kissinger, “Documentation: Foreign Policy and National Security”, dalam *International Security*, Vol. 1 No. 1 (1976), hal. 182-191.

untuk mencapai tujuan-tujuannya di bawah anarkhi. Namun, lanjut Waltz, tujuan akhir negara-negara sebenarnya bukan pada *power*, tetapi pada keamanan.¹³

Kaum neo-realis, seperti Kenneth Waltz dan John Mearsheimer, sejak awal memang meletakkan pemikirannya di tengah-tengah perdebatan tentang keamanan. Sama seperti kaum realis, mereka berpendapat bahwa negara merupakan aktor utama ketika kita berbicara tentang keamanan, dan sifat anarkhis dari sistem internasional mendorong negara-negara mengejar kapabilitas militer yang ofensif untuk mempertahankan atau memperluas diri (*to defend or to expand themselves*).¹⁴ Ide dasarnya adalah semakin kuat secara militer suatu negara, semakin baik untuk keamanannya. Meskipun menurut Kenneth Waltz, *power* bukan tujuan akhir dari negara-negara, namun hampir semua kaum neo-realis melihat *power* sebagai hal yang *crucial* bagi keamanan, dan *power* itu harus terwujud terutama dalam bentuk militer yang kuat.

Selain realisme dan neorealisme, salah satu perspektif yang termasuk sebagai pendekatan tradisional terhadap keamanan internasional adalah studi strategis (*strategic studies*). Dalam melihat isu keamanan internasional, studi strategis memusatkan perhatian pada respon dari negara-negara dan aktor-aktor lain terhadap lingkungan keamanan internasional. Jika keamanan merupakan kondisi, strategi adalah reaksinya. Tindakan strategis yang diambil suatu negara (aktor) pada gilirannya mempengaruhi kondisi keamanan yang dihadapi negara (aktor) lain. Dengan kata lain, meskipun keamanan merupakan kondisi, tetapi strategi juga dapat menjadi pemicu atau menjadi variabel independen dari keamanan. Studi strategis banyak menyoroiti isu-isu penggunaan kekuatan (*the use of force*) yang memiliki pengaruh besar terhadap kondisi keamanan regional dan internasional, maupun terhadap kondisi keamanan nasional suatu negara.¹⁵

Studi perdamaian (*peace studies* atau *peace research*) juga merupakan salah satu perspektif tradisional terhadap isu keamanan. Namun, aliran pemikiran yang lahir pasca periode 1945 ini jauh lebih maju daripada realisme (neorealisme) yang fokus pada *state-centric* atau studi strategis yang hirau pada *power politics* dan keamanan militer. Studi perdamaian hadir dengan rekonseptualisasi tentang kekerasan dan berusaha memusatkan perhatian pada resolusi konflik dan perwujudan perdamaian (*conflict resolution and peace-building*). Melalui pemahaman terhadap sifat dari konflik-konflik umat manusia dan alasan di balik konflik-konflik itu, studi perdamaian secara akademis berusaha untuk mengatasi tidak hanya resolusi damai tetapi juga mendefinisikan dan menentukan konsepsi positif dari perdamaian sebagai suatu kondisi yang dapat dipekerjakan kearah sebuah proses maupun tujuan.¹⁶

¹³ Kenneth Waltz, "The Origin of War in Neorealist Theory", dalam *The Journal of Interdisciplinary History*, Vol. 18 No. 4 (1988), hal. 615-628.

¹⁴ John Mearsheimer, "Structural Realism", dalam Tim Dunne, Milja Kurki, dan Steve Smith (eds.), *International Relations Theories: Discipline and Diversity* (Oxford: Oxford University Press, 2010).

¹⁵ Robert Ayson, "Strategic Studies", dalam Christian Reus-Smit dan Dincan Snidal (eds.), *The Oxford Handbook of International Relations* (Oxford: Oxford University Press, 2008).

¹⁶ James Whitehead, "Peace Studies: An Alternative Perspective on International Security", dalam <http://www.e-ir.info/2013/08/30/peace-studies-an-alternative-perspective-on-international-security/> [Diakses 11 Januari 2017].

PENDEKATAN-PENDEKATAN NON-TRADISIONAL

Memasuki dasawarsa 1990-an, pendekatan tradisional kurang mendapatkan tempat di kalangan komunitas studi keamanan internasional. Para pakar HI yang menspesialisasikan diri pada isu-isu keamanan internasional mulai menempuh pendekatan baru, yaitu pendekatan non-tradisional. Barry Buzan menyebut pendekatan keamanan non-tradisional ini sebagai pendekatan keamanan kritis (*critical security approach*), yang menekankan gagasan bahwa individu merupakan entitas penting bagi keamanan.¹⁷ Pemikiran lain yang dapat diklasifikasikan ke dalam pendekatan keamanan non-tradisional ini diantaranya konstruktivisme, studi keamanan pasca-strukturalis, studi keamanan pasca-kolonial, studi keamanan feminis, dan keamanan manusia.

Menurut Keith Krause, kajian teori kritis (*critical theory*) terhadap masalah keamanan menekankan tema-tema sentral dan agenda penelitian tentang: bagaimana ancaman-ancaman (*threats*) dan respon-respon yang tepat dikonstruksi, bagaimana 'objek' tentang keamanan dikonstruksi, dan apa kemungkinan-kemungkinan dari transformasi *security dilemma*. Teori kritis merangkum enam klaim sentral (mengenai konstitusi aktor-aktor politik dunia, sifat dinamis dan yang dikonstruksinya, alat-alat metodologis dan klaim-klaim epistemologis yang menyertainya, dan tujuan dari teorisasi) yang merupakan ciri khas dari pendekatan kritis terhadap kajian keamanan.¹⁸ Teori kritis tentang studi keamanan ini sering dikenal sebagai bagian dari aliran Aberystwyth atau Welsh (*Aberystwuth/Welsh School*).

Sementara itu aliran poststrukturalis yang mulai terlibat dalam kajian tentang keamanan pada akhir 1980-an, didorong oleh sejumlah faktor. *Pertama*, filsafat poststrukturalis telah menjadi fitur utama dari humaniora sejak 1970-an sehingga selaras dengan kecenderungan studi keamanan yang mulai berfokus pada manusia (bukan lagi negara). *Kedua*, perhatian poststrukturalisme terhadap *power*, struktur-struktur, dan efek-efek pengetahuan yang menertibkannya, tampaknya beresonansi cukup baik dengan tema-tema inti dalam realisme klasik tentang kajian keamanan. *Ketiga*, poststrukturalisme merupakan bagian dari kontestasi politik dan normatif yang secara luas melihat bipolaritas nuklir AS-US pada periode kedua Perang Dingin sebagai 'kekaisaran jahat'. *Keempat*, sebagaimana para peneliti perdamaian, kaum poststrukturalis juga melakukan kritik tajam terhadap cara Dunia Ketiga dieksploitasi oleh Barat melalui superioritas militer, politik dan ekonomi.¹⁹

Pemikiran baru lainnya tentang studi keamanan yang menonjol di era pasca Perang Dingin adalah postkolonialisme. Aliran pemikiran ini hadir sebagai kritik terhadap karakter studi-studi tentang keamanan sejak Perang Dunia II yang terlalu berorientasi Eropa atau Barat (*Euro-centric* atau *Western-centric*). Dengan mengambil apa yang ada dalam geografi sejarah yang mendukung studi-studi keamanan, postkolonialisme secara sistematis berusaha menggambarkan peran dari negara-negara Selatan dalam hubungan-hubungan keamanan global yang melahirkan pandangan yang

¹⁷ Barry Buzan, *People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era* (Colchester, UK: ECPR Press, 2009).

¹⁸ Keith Krause, "Critical Theory and Security Studies: The Research Programme of Critical Security Studies", dalam *Cooperation and Conflict*, Vol. 33 No. 3 (1998), hal. 298-333.

¹⁹ Lene Hansen, "Poststructuralism and Security", dalam Robert A. Danemark (ed.), *International Studies Encyclopedia* (Oxford: Oxford University Press, 2010).

berbeda dari Eropa dan Barat mengenai politik dunia. Dalam pandangan kaum postkolonialis, memahami hubungan-hubungan keamanan (di masa lalu maupun masa kini) membutuhkan saling pengakuan (*mutual constitution*) antara dunia Barat dan non-Barat, serta pengakuan peran bersama mereka dalam membuat sejarah.²⁰

Sementara itu perspektif feminisme tentang keamanan internasional muncul sebagai kritik terhadap teori-teori HI yang terlalu berorientasi pada dunia laki-laki (*man's world*), seperti aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan *power* dan konflik.²¹ Kritik atau ketidakpuasan feminisme terhadap studi HI terutama banyak diarahkan pada studi keamanan internasional. Sebagaimana dikatakan Ann Tickner, teori-teori dan praktik-praktik keamanan internasional masih merupakan dunia laki-laki. Posisi-posisi perempuan dalam pembuatan kebijakan keamanan internasional juga merupakan fenomena langka. Selain itu teks-teks ilmiah tentang keamanan internasional yang mengacu pada perempuan atau faktor gender secara keseluruhan pun sulit ditemukan.²²

Teori feminis yang secara eksplisit bersifat normatif dan seringkali emansipatoris, meyakini bahwa klaim objektivitas dan universalitas pengetahuan (terutama yang bersangkutan dengan laki-laki) harus dipertanyakan, termasuk teori-teori tentang keamanan. Kaum feminis berusaha mengembangkan apa yang mereka sebut dengan “pengetahuan praktis” atau pengetahuan yang dikembangkan dari praktik kehidupan masyarakat sehari-hari, dimana perempuan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam praktik tersebut.²³ Mereka percaya bahwa teori-teori tentang keamanan tidak dapat dipisahkan dari praktik kehidupan sehari-hari masyarakat internasional. Perempuan, seperti halnya laki-laki, memiliki pengetahuan, perspektif, dan pengalaman yang bisa dibawa dan dilibatkan dalam perumusan teori-teori maupun kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu keamanan internasional. Sebab itu, teori HI (khususnya kajian tentang keamanan internasional) tidak boleh lagi “meminggirkan” eksistensi dan peran perempuan.

Dalam pada itu, perspektif konstruktivis tentang keamanan internasional secara garis besar dapat diklasifikasikan dalam dua jenis, yaitu *conventional constructivist* dan *critical constructivist*. Konsep-konsep yang menjadi pegangan kaum konstruktivis konvensional adalah norma (*norms*) dan identitas (*identity*), sedangkan kaum konstruktivis kritis lebih banyak menaruh perhatian pada konsep kekuasaan (*power*) dan wacana (*discourse*). Konstruktivis konvensional membahas tentang peran norma dan identitas di balik isu-isu keamanan internasional. Kaum konstruktivis konvensional berbeda dengan rasionalisme dalam memandang ontologi keamanan, karena mereka menekankan pada ontologi sosial, yakni bagaimana struktur-struktur ideasional atau normatif membentuk *agent* dan kepentingannya. Karena individu dan negara adalah

²⁰ Tarak Barkawi dan Mark Laffey, “The Postcolonial Moment in Security Studies”, dalam *Review of International Studies*, Vol. 32 No. 2 (2006), hal. 329 - 352.

²¹ J. Ann Tickner, “Hans Morgenthau’s Principles of Political Realism: A Feminist Reformulation”, dalam *Millennium: Journal of International Studies*, Vol. 17 No. 3 (1988), hal. 429-440.

²² Laura Sjoberg (ed.), *Gender and International Security: A Feminist Perspectives* (London: Routledge, 2010), hal. 1.

²³ J. Ann Tickner, “Feminist Responses to International Security Studies”, dalam *Peace Review*, Vol. 16 No. 1 (2004), hal. 43-48.

‘makhluk’ sosial maka membahas tentang keamanan individu maupun negara tidak dapat dilepaskan dari konteks makna normatif.²⁴

Sementara itu konstruktivisme kritis oleh Cristian Reus-Smit dan Richard Price meskipun disebut sebagai generasi baru teori kritis, namun tetap diberi label konstruktivisme karena karakteristiknya yang hirau terhadap masalah konstruksi sosial dari politik dunia. Dalam masalah keamanan internasional, kaum konstruktivis kritis ini memfokuskan pada bagaimana “persepsi tentang ancaman sebagai objek dari keamanan, secara sosial dikonstruksi”. Jika teori-teori HI arus utama *concern* pada pertanyaan ‘mengapa’ (*why*) dan dimaksudkan untuk eksplanatori, maka pendekatan konstruktivis kritis berkaitan pada pertanyaan ‘bagaimana’ (*how*) yang dimaksudkan untuk memahami (*understanding*). Dalam penelitian masalah keamanan, kaum konstruktivis kritis menekankan metode wacana dan linguistik, penggunaan bahasa dalam konstruksi sosial tentang isu-isu keamanan internasional.²⁵

BROADENING DAN DEEPENING ISU KEAMANAN

Intinya, fitur studi keamanan internasional sebelum dan setelah Perang Dingin jauh berbeda. Perbedaan ini tidak hanya terjadi dalam isu-isu yang dibahas, melainkan juga dalam metodologi yang digunakan untuk membahas atau meneliti isu-isu tersebut. Dalam hal metodologi, studi keamanan pasca Perang Dingin cenderung mulai memperhitungkan aspek-aspek ‘subjektivitas’ para aktor. Sementara dalam hal isu yang dibahas, berbagai isu baru mulai diperkenalkan, seperti masalah lingkungan hidup (*global warming, climate change*, polusi, pengikisan sumber-sumber daya), kemiskinan, terorisme, penyakit menular, masalah pengungsi dan migrasi, bencana alam, perdagangan narkoba, kejahatan transnasional, keamanan informasi, dan sebagainya. Gagasan keamanan non-tradisional berasumsi bahwa isu-isu non-konvensional tersebut merupakan masalah bersama seluruh negara dan untuk menanganinya diperlukan tindakan afirmatif yang bersifat kolektif. Selain itu, pendekatan keamanan non-tradisional juga berorientasi pada keamanan individu, bukan *state-centric oriented* sebagaimana pendekatan realis (tradisional).

Menurut Emma Rothschild, apa yang terjadi sebenarnya bukan “perubahan”, melainkan “perluasan makna” (*broadening of meaning*) atas konsep keamanan internasional. Memasuki dekade 1990-an sedikitnya terjadi empat “perluasan makna” berkenaan dengan konsep keamanan internasional. *Pertama*, perluasan ke bawah (*extended downwards*), di mana konsep keamanan diperluas dari keamanan nasional (*national security*) menjadi keamanan kelompok (*security of groups*) atau keamanan individu (*security of individuals*). *Kedua*, perluasan ke atas (*extended upwards*), yakni perluasan dari konsep keamanan nasional menjadi keamanan lingkungan fisik supranasional, dari orientasi ke negara menjadi ke orientasi ke biosfir. *Ketiga*, perluasan secara horizontal (*extended horizontally*), di mana konsep keamanan diperluas dari keamanan militer menjadi keamanan politik, ekonomi, sosial, lingkungan, atau sering

²⁴ Nilufer Karacasulu dan Elif Uzgoren, “Explaining Social Constructivist Contribution to Security Studies”, dalam *Perceptions*, Vol. 12 No. 1 (2007), hal. 27-48.

²⁵ *Ibid.*

disebut keamanan manusia (*human security*). Keempat, memperluas sendiri (*itself extended*), di mana mulai tumbuh tanggung jawab politik untuk memelihara keamanan, sehingga konsep keamanan berdifusi ke segala arah.²⁶

Kecenderungan untuk memperluas (*broadening*) atau memperdalam (*deepening*) merupakan salah ciri khas dari para ahli keamanan non-tradisional. Mereka mengintrodusir konsep ‘keamanan manusia’ (*human security*) dan berpendapat bahwa objek rujukan utama keamanan tidak harus negara, tetapi orang-orang secara individu, termasuk institusi dan kelompok. Richard Falk, misalnya, meyakini bahwa keamanan harus didefinisikan sebagai ‘negasi dari ketidakamanan yang secara khusus dialami oleh individu atau kelompok dalam situasi kongkrit.’²⁷ Ole Waever juga mengatakan, keamanan bukan hanya pertahanan militer dari suatu negara, tetapi juga x dan y dan z – memiliki efek yang menguntungkan dari meluasnya ranah keamanan, sampai meliputi agenda sosial dan politik secara keseluruhan.²⁸

Menurut Roland Paris, konsep *human security* muncul hampir bersamaan dengan konsep-konsep seperti keamanan bersama (*common security*), keamanan global (*global security*), keamanan kooperatif (*cooperative security*) dan keamanan komprehensif (*comprehensive security*). Munculnya konsep *human security* membuat studi tentang keamanan bergerak dari fokus pada negara menjadi pada individu. Konsep ini memberikan penekanan pada pentingnya HAM, aman dari kekerasan, dan perkembangan yang berkelanjutan (*sustainable development*).²⁹ Meskipun istilah *human security* diperkenalkan oleh UNDP (*United Nations Development Programme*), namun konsep tersebut muncul dari penggabungan sejumlah konsep yang berbeda, diantaranya konsep perkembangan manusia (*human development*), perkembangan berkelanjutan (*sustainable development*), dan tanggung jawab melindungi (*responsibility to protect*).³⁰

UNDP membedakan konsep *human security* dalam tujuh dimensi, yaitu: (1) Keamanan ekonomi (*economic security*) –memastikan setiap individu memiliki pendapatan minimum yang diperlukan; (2) Keamanan pangan (*food security*) –menjamin akses fisik dan ekonomi terhadap bahan-bahan pangan dasar; (3) Keamanan kesehatan (*health security*) –menjamin perlindungan minimum dari penyakit dan gaya hidup yang tak sehat; (4) Keamanan lingkungan (*environmental security*) –melindungi setiap orang dari kerusakan alam jangka pendek maupun jangka panjang, ancaman buatan manusia terhadap alam, dan kemerosotan lingkungan alam; (5) Keamanan pribadi (*personal security*) –melindungi setiap individu dari kekerasan fisik; (6) Keamanan komunitas (*community security*) –melindungi setiap orang dari punahnya nilai-nilai dan relasi-relasi tradisional, serta dari kekerasan etnis dan sektarian; (7)

²⁶ Emma Rothschild, “What is Security”, dalam Barry Buzan dan Lene Hansen, *International Security: Widening Security* (London: SAGE Publications Ltd., 2007), hal. 2.

²⁷ Richard Falk, *On Humane Governance: Toward a New Global Politics* (Cambridge: Polity Press, 1995), hal. 146.

²⁸ Ole Waever, “Securitization and De-securitization”, dalam Barry Buzan dan Lene Hansen, *International Security: Widening Security* (London: SAGE Publications Ltd., 2007), hal. 68.

²⁹ Roland Paris, “Human Security: Paradigm Shift or Hot Air?”, dalam *International Security*, Vol. 26 No. 2 (2001), hal. 87-102.

³⁰ Fen Osler Hampson dan David Malone (eds.), *From Reaction to Conflict Prevention: Opportunities for UN System* (London: Lynne Rinner Publishers, Inc., 2002), hal. 152.

Keamanan politik (*political security*) –memastikan setiap orang hidup dalam sebuah masyarakat yang menghormati hak-hak dasar manusia.³¹

Selain konsep keamanan manusia atau keamanan individu, para penganut pendekatan keamanan non-tradisional juga memperkenalkan konsep ‘sekuritisasi’ (*securitization*). Hampir semua analisis HI sepakat bahwa ‘sekuritisasi’ merupakan konsep khas yang membedakan madzab Kopenhagen dan madzab-madzab HI lainnya yang membahas tentang keamanan. Eksistensi konsep ‘sekuritisasi’ dalam studi HI sudah semakin mapan dan dikenal luas. Dalam konteks akademis, jumlah dan ruang lingkup publikasi ilmiah yang berkenaan dengan ‘sekuritisasi’ terus meningkat dari waktu ke waktu. Sedangkan dalam praktik hubungan internasional konsep ‘sekuritisasi’ juga telah banyak diterapkan dalam kebijakan luar negeri dan keamanan dari banyak negara.³² Konsep ini sering pula diaplikasikan dalam mengkonstruksi kejahatan transnasional³³ dan masalah HIV/AIDS sebagai ancaman keamanan, hingga berbagai dimensi tentang ‘perang melawan teror’, dan hak-hak minoritas.

Konsep ‘sekuritisasi’ itu sendiri pertama kali memasuki ranah studi HI melalui ulasan Ole Waever (1995). Konsep ‘sekuritisasi’ waktu itu dimaksudkan Waever sebagai suatu penyegaran atas perdebatan yang melelahkan antara mereka yang mengklaim bahwa ancaman (*threats*) adalah objektif (yaitu apa yang benar-benar merupakan ancaman terhadap keamanan internasional) dan mereka yang mempertahankan pandangan bahwa keamanan adalah subjektif (yaitu apa yang dianggap sebagai ancaman). Demi untuk menghindari atau mengambil jalan pintas atas perdebatan dua pemikiran ini, madzab Kopenhagen menyarankan bahwa keamanan harus dilihat sebagai sebuah tindakan berujar (*speech act*), yang isu sentralnya bukan soal ancaman yang nyata atau tidak, namun cara-cara di mana sebuah isu tertentu (pergerakan pasukan, migrasi, atau degradasi lingkungan) secara sosial dapat menjadi suatu ancaman. Gagasan *speech act* ini memiliki tradisi panjang dalam filsafat, yang mengacu pada pemikiran bahwa mengatakan sesuatu berarti sesuatu itu dilakukan (*saying something, something is done*).³⁴

Dengan kata lain, sama seperti memberi nama sebuah pesawat tempur adalah sebuah perbincangan (*speech act*), mengucapkan kata ‘keamanan’ (*security*) juga dapat dilihat sebagai tindakan dengan mana semua jenis isu (militer, politik, ekonomi, dan lingkungan) bisa menjadi sebuah ancaman. Namun, menurut Ole Waever dan para koleganya di madzab Kopenhagen, tidak semua percakapan tentang ‘keamanan’ memenuhi kualifikasi sebagai ‘sekuritisasi’. Sebuah *speech act* dapat disebut ‘sekuritisasi’ apabila memenuhi struktur retorika tertentu, yang berasal dari perang dan konotasi historis mengenai *survival*, urgensi, ancaman dan pertahanan. Inilah yang membuat madzab Kopenhagen mendefinisikan ‘sekuritisasi’ harus memenuhi tiga kriteria retorik. ‘Sekuritisasi’ adalah proses diskursif di mana seorang aktor: (1)

³¹ UNDP sebagaimana dikutip Philip Jan Schäfer, *Human and Water Security in Israel and Jordan* (New York: Springer, 2013), hal. 8.

³² Lihat Rita Abrahamsen, “Blair’s Africa: The Politics of Securitization and Fear”, dalam *Alternatives*, Vol. 30 No. 1 (2005), hal. 55-80.

³³ Lihat karya Ralf Emmers, “ASEAN and the Securitization of Transnational Crime in Southeast Asia”, dalam *The Pasific Review*, Vol 16 No. 3 (2004), hal. 419-438.

³⁴ Rens van Munster, “Securitization”, dalam <http://www.oxfordbibliographies.com/> [Diakses 24 Juni 2016].

mengklaim bahwa suatu objek rujukan secara eksistensial terancam; (2) menuntut hak untuk mengambil tindakan pencegahan yang luar biasa untuk menghadapi ancaman itu; dan (3) meyakinkan audiens bahwa perilaku melanggar aturan (*rule-breaking*) untuk melawan ancaman tersebut dibenarkan.³⁵ Singkatnya, dengan memberi label sesuatu sebagai ‘keamanan’, sebuah isu dapat didramatisasi menjadi masalah dengan prioritas tertinggi.

Dapat dikatakan bahwa ‘sekuritisasi’ merupakan suatu proses di mana masalah-masalah yang tidak dipolitisasi (tidak diperbincangkan) atau yang dipolitisasi (yang diperdebatkan secara publik), diangkat menjadi isu keamanan yang perlu ditangani dengan urgensi dan dibenarkan mengabaikan perdebatan publik dan prosedur-prosedur demokrasi. Madzab Kopenhagen awalnya mempelajari keamanan dalam lima isu yang berbeda dari sektor-sektor yang tidak eksklusif, yaitu militer, politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan.³⁶ Namun kemudian analisis tentang ‘sekuritisasi’ meluas ke berbagai sektor, seperti kesehatan, imigrasi, HAM, hak-hak minoritas, *human trafficking*, hingga terorisme. Karena ‘sekuritisasi’ memungkinkan tindakan darurat di luar kontrol norma-norma demokrasi, para sarjana madzab Kopenhagen pada umumnya menyarankan untuk menempuh strategi ‘desekuritisasi’ sebagai modus yang lebih baik untuk pemecahan masalah. Misalnya, dalam menghadapi ancaman terorisme, cara-cara deradikalisasi lebih baik daripada tindakan pemberantasan melalui jalan kekerasan (cara-cara militer).³⁷

Konsep ‘sekuritisasi’ semakin memperoleh pengakuan penuh dari para sarjana HI mulai 1998 setelah terbitnya buku *Security: A New Framework for Analysis* (karya Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap Wilde). Banyak buku dan karya ilmiah mengenai ‘sekuritisasi’ dipublikasikan pasca terbitnya buku Buzan (et al) tersebut. Misalnya, pada 1998 terbit karya Jef Huysmans berjudul “Revisiting Copenhagen: Or, On the Creative Development of a Security Studies Agenda in Europe”. Artikel ilmiah yang dimuat di *European Journal of International Relations* ini secara rinci mengulas perkembangan madzab Kopenhagen dan secara kritis mengulas gagasan ‘sekuritisasi’ sebagai sebuah *speech act* yang mengikuti tata bahasa tertentu. Artikel ini juga mengaitkan ‘teori sekuritisasi’ dengan inovasi-inovasi lain yang diperkenalkan ke dalam studi keamanan (*security studies*) oleh madzab Kopenhagen seperti konsep “security complex” dan gagasan bahwa ada sektor-sektor yang beragam mengenai keamanan.³⁸

Konsep penting lainnya yang juga dihasilkan oleh para penganut pendekatan keamanan non-tradisional adalah konsep keamanan regional. Salah satu teori yang berkembang berkaitan dengan konsep keamanan regional ini adalah *regional security complex theory* yang dikembangkan oleh Barry Buzan dan Ole Waever dalam karyanya yang terbit 2003 berjudul *Regions and Powers: The Structure of International*

³⁵ Rens van Munster, *Ibid.*

³⁶ Lihat Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde, *Security: A New Framework for Analysis* (Boulder: Lynne Rienner Publishers, Inc., 1998), hal. 26-33.

³⁷ Ole Waever, “Securitization and Desecuritization”, dalam Ronnie Lipschutz (ed.), *On Security* (New York: Columbia University Press, 1995), hal. 46-86.

³⁸ Lihat Jef Huysmans, “Revisiting Copenhagen: Or, On the Creative Development of a Security Studies Agenda in Europe,” dalam *European Journal of International Relations*, Vol. 4 No. 4 (1998), hal. 479–505.

Security.³⁹ Konsep kompleks keamanan regional membahas terpusatnya keamanan di wilayah-wilayah yang terbentuk secara geografis. Persoalan keamanan sulit menyebar secara luas, dan ancaman sangat mungkin muncul di dalam kawasan tersebut. Keamanan setiap aktor di sebuah kawasan berinteraksi dengan keamanan aktor lain. Biasanya terdapat interdependensi keamanan yang tinggi di dalam suatu kawasan; sedangkan interdependensi lintas kawasan justru tidak terjadi. Salah satu studi tentang keamanan regional yang menarik pasca Perang Dingin adalah kajian mengenai komunitas keamanan (*security community*) dengan pendekatan konstruktivis sebagaimana yang dilakukan Amitav Acharya, Hasan Ulusoy, Raimo Vayrynen, Vanessa Parekh, dan lain-lain.

KESIMPULAN

Konsep keamanan (baik dalam konteks nasional maupun internasional) telah mengalami perubahan atau pergeseran makna setelah era Perang Dingin berakhir. Pada era Perang Dingin, konsep keamanan dalam studi HI selalu dihubungkan dengan hal ihwal militer. Keamanan dikaitkan dengan konsep ancaman militer dan menghindari konflik antar negara-negara nasional. Dengan kata lain, studi keamanan internasional merupakan studi tentang ancaman, penggunaan dan pengendalian kekuatan militer. Namun, setelah era Perang Dingin bubar, makna konsep keamanan diperluas, sehingga lebih mengacu pada perlindungan kehidupan manusia (*protection of human life*) dari berbagai jenis kekuatan yang mengancam eksistensi dan perkembangan kehidupannya tersebut.

Dengan demikian, studi keamanan internasional pasca Perang Dingin telah mengalami proses pelebaran (*widening*) atau perluasan (*broadening*) dalam hal subjek yang dikaji. Studi keamanan internasional tidak lagi terlalu fokus pada konflik dan strategi militer negara-negara besar, melainkan telah melebar dan meluas pada isu-isu yang semasa era Perang Dingin terpinggirkan oleh berbagai diplomasi tingkat tinggi, seperti degradasi lingkungan, keamanan ekonomi, kelangkaan energi dan sumber daya alam lainnya, masalah penyakit menular, dan lain-lain. Selain itu, studi keamanan internasional pasca Perang Dingin juga memperlihatkan kecenderungan kearah pendalaman (*deepening*), yakni proses pergeseran penekanan dari keamanan negara nasional (*security of the national state*) menuju perhatian yang lebih besar terhadap keamanan individu (*security of the individual*). Pergeseran fokus ini telah menyebabkan meningkatnya minat terhadap topik-topik 'keamanan manusia', sekaligus suatu pengakuan bahwa selama ini aplikasi konsep 'keamanan nasional' yang diagungkan banyak negara ternyata tidak mencakup atau melindungi 'keamanan individu'.***

REFERENSI

Abrahamsen, Rita, "Blair's Africa: The Politics of Securitization and Fear", dalam *Alternatives*, Vol. 30 No. 1 (2005), hal. 55-80.

³⁹ Barry Buzan dan Ole Waever, *Regions and Powers: The Structure of International Security* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003).

- Ayson, Robert, "Strategic Studies", dalam Christian Reus-Smit dan Dincan Snidal (eds.), *The Oxford Handbook of International Relations* (Oxford: Oxford University Press, 2008).
- Barkawi, Tarak dan Mark Laffey, "The Postcolonial Moment in Security Studies", dalam *Review of International Studies*, Vol. 32 No. 2 (2006), hal. 329 - 352.
- Buzan, Barry, Ole Waever, dan Jaap de Wilde, *Security: A New Framework for Analysis* (Boulder: Lynne Rienner Publishers, Inc., 1998).
- Buzan, Barry dan Ole Waever, *Regions and Powers: The Structure of International Security* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003).
- Buzan, Barry, People, *States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era* (Colchester, UK: ECPR Press, 2009).
- Buzan, Barry dan Lene Hansen, *The Evolution of International Security Studies* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009).
- Carnesale, Albert dan Michael Nacht, "Forward", dalam *International Security*, Vol. 1 No. 1 (1976), hal. 2.
- Collins, Alan (ed.), *Contemporary Security Studies* (Oxford: Oxford University Press, 2013).
- Emmers, Ralf, "ASEAN and the Securitization of Transnational Crime in Southeast Asia", dalam *The Pasific Review*, Vol 16 No. 3 (2004), hal. 419-438.
- Falk, Richard, *On Humane Governance: Toward a New Global Politics* (Cambridge: Polity Press, 1995), hal. 146.
- Fox, William T.R. sebagaimana dikutip David A. Baldwin, "Security Studies and the End of the Cold War", dalam *World Politics*, Vol. 48 No.1 (1995), hal. 117-141.
- Gray, Colin S., *Strategic Studies and Foreign Policy: The American Experience* (Kentucky: The University Press of Kentucky, 1982).
- Hampson, Fen Osler dan David Malone (eds.) , *From Reaction to Conflict Prevention: Opportunities for UN System* (London: Lynne Rinner Publishers, Inc., 2002).
- Hansen, Lene, "Poststructuralism and Security", dalam Robert A. Danemark (ed.), *International Studies Encyclopedia* (Oxford: Oxford University Press, 2010).
- Hough, Peter, *Understanding Global Security* (London: Routledge, 2004).
- Huysmans, Jef, "Revisiting Copenhagen: Or, On the Creative Development of a Security Studies Agenda in Europe," dalam *European Journal of International Relations*, Vol. 4 No. 4 (1998), hal. 479-505.

- Karacasulu, Nilufer dan Elif Uzgoren, "Explaining Social Constructivist Contribution to Security Studies", dalam *Perceptions*, Vol. 12 No. 1 (2007), hal. 27-48.
- Kissinger, Henry, "Documentation: Foreign Policy and National Security", dalam *International Security*, Vol. 1 No. 1 (1976), hal. 182-191.
- Krause, Keith, "Critical Theory and Security Studies: The Research Programme of Critical Security Studies", dalam *Cooperation and Conflict*, Vol. 33 No. 3 (1998), hal. 298-333.
- Luciani, Giacomo, "The Economic Content of Security", dalam *Journal of Public Policy*, Vol. 8 No. 2 (1989), hal. 151-173.
- Mearsheimer, John, "Structural Realism", dalam Tim Dunne, Milja Kurki, dan Steve Smith (eds.), *International Relations Theories: Discipline and Diversity* (Oxford: Oxford University Press, 2010).
- Munster, Rens van, "Securitization", dalam <http://www.oxfordbibliographies.com/> [Diakses 24 Juni 2016].
- Paris, Roland, "Human Security: Paradigm Shift or Hot Air?", dalam *International Security*, Vol. 26 No. 2 (2001), hal. 87-102.
- Rothschild, Emma, "What is Security", dalam Barry Buzan dan Lene Hansen, *International Security: Widening Security* (London: SAGE Publications Ltd., 2007).
- Sjoberg, Laura (ed.), *Gender and International Security: A Feminist Perspectives* (London: Routledge, 2010).
- Tickner, J. Ann, "Hans Morgenthau's Principles of Political Realism: A Feminist Reformulation", dalam *Millennium: Journal of International Studies*, Vol. 17 No. 3 (1988), hal. 429-440.
- Tickner, J. Ann, "Feminist Responses to International Security Studies", dalam *Peace Review*, Vol. 16 No. 1 (2004), hal. 43-48.
- UNDP sebagaimana dikutip Philip Jan Schäfer, *Human and Water Security in Israel and Jordan* (New York: Springer, 2013).
- Waever, Ole, "Securitization and Desecuritization", dalam Ronnie Lipschutz (ed.), *On Security* (New York: Columbia University Press, 1995).
- Waever, Ole, "Securitization and De-securitization", dalam Barry Buzan dan Lene Hansen, *International Security: Widening Security* (London: SAGE Publications Ltd., 2007).

Waltz, Kenneth, “The Origin of War in Neorealist Theory”, dalam *The Journal of Interdisciplinary History*, Vol. 18 No. 4 (1988), hal. 615-628.

Whitehead, James, “Peace Studies: An Alternative Perspective on International Security”, dalam <http://www.e-ir.info/2013/08/30/peace-studies-an-alternative-perspective-on-international-security/> [Diakses 11 Januari 2017].